

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pengkadan Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Pengkadan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

Penyampaian Laporan Kinerja ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban kami sebagai pelaporan atas capaian kinerja pembangunan tahun anggaran 2021, termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegagalan, kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan di tahun 2021.

Sebagai laporan capaian kinerja, maka Laporan Kinerja ini memuat capaian-capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan penjelasan atau analisa dalam tiap-tiap indikator yang termuat dalam sasaran-tersebut. Dalam hal melakukan perhitungan sesuai dengan formula yang telah didefinisikan tersebut dihasilkan angka-angka capaian yang menggambarkan persentase keberhasilan atau kurang berhasilnya kinerja Kecamatan Pengkadan. Dengan data-data tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and cleangovernance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja ini, dan semoga Laporan Kinerja ini menjadi bahan telaah bagi Kecamatan Pengkadan pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya, dalam rangka menuju tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengkadan, 31 Januari 2022  
Camat Pengkadan,

**TABRI, S.E., M.A.P**

Pembina Tk. I  
NIP. 19641222 1987303 1 006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat mengevaluasi diri sendiri. Suatu organisasi maupun instansi entah pihak pemerintahan maupun swasta akan berjalan dengan baik jika melakukan evaluasi demi perbaikan dan penyempurnaan lembaga tersebut. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dimanfaatkan oleh pemberi manfaat sebagai evaluasi dan oleh manajemen Kantor Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu akan digunakan sebagai satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja. Laporan ini menjadi indikator untuk membentuk pelayanan yang prima pada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya terjadi peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju serta mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat umum menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan secara berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, adil, bertanggung jawab, transparansi, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan strategi dengan visi misi yang jelas, tujuan dan sasaran yang tepat, serta menetapkan cara-cara pencapaian dan sasaran yang tepat pula.

Pada akhirnya dalam mencapai kinerja Kantor Kecamatan Pengkadan harus bertanggung jawab sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2018 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Kecamatan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

## 1. Visi

Adapun Visi Kecamatan Pengkadan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yakni **“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG MAKSIMAL (PRIMA), TRANSPARAN DAN MEMUASKAN DI KECAMATAN PENGKADAN”**.

Dalam Visi di atas mengandung makna, antara lain:

Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional mengandung arti pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada publik dilakukan oleh aparatur dengan semangat profesionalisme, terencana, dan tepat waktu. Pelayanan Publik yang Prima, berkualitas tersebut berawal dari perencanaan yang matang, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, *Tugas Umum Pemerintahan* adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugasnya.

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 4 (Empat) misi Kecamatan Pengkadan yaitu :

- ✓ *Meningkatkan Kualitas pegawai Kecamatan Pengkadan yang professional dalam pelayanan dan berdedikasi,*
- ✓ *Mengupayakan fasilitas kerja untuk tercapainya kwalitaas pelayanan yang optimal,*

- ✓ *Menciptakan hubungan yang harmonis antara pegawai instansi dan masyarakat,*
- ✓ *Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan publik.*

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi
- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*)
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
- g. Rumusan Tujuan harus mencerminkan "*Core Area*" dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Pengkadan . menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Misi "MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT" adalah Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta terlaksananya akuntabilitas.
2. Tujuan dari Misi "MENINGKATKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN" adalah Terciptanya administrasi Tata Pemerintahan kecamatan yang baik yang didukung oleh data-data yang akurat dan tepat.
3. Tujuan dari Misi "MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA" adalah Terciptanya kinerja aparat pemerintahan desa yang produktif dan kreatif sehingga pelayanan masyarakat lebih cepat dan tepat waktu.
4. Tujuan dari Misi "MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN" adalah mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dengan mengikutsertakan peran serta seluruh masyarakat.
5. Tujuan dari Misi "MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program Pemerintah yang masuk ke Kecamatan Pengkadan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSKUSIF .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>6</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>7</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>7</b>
1. Pendahuluan .....	7
2. Susunan Organisasi .....	9
3. Tupoksi .....	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	15
5. Sumber Daya Keuangan .....	16
6. Sarana dan Prasarana .....	17
 <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	 <b>19</b>
<b>A. RENSTRA .....</b>	<b>19</b>
1. Visi .....	20
2. Misi .....	20
3. Tujuan dan Sasaran .....	22
4. Strategi dan Kebijakan.....	47
<b>B. PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>48</b>
 <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>58</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>58</b>
<b>B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS</b>	
<b>KINERJA .....</b>	<b>61</b>
<b>C. REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI</b>	
<b>BELANJA ANALISIS.....</b>	<b>73</b>
 <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	 <b>74</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Kecamatan Pengkadan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak H. Aspar Aswin dengan nama Kecamatan Batu Datu pada hari Senin tanggal 6 Januari 1997. Kecamatan Batu Datu merupakan pemekaran dari Kecamatan Embau (sekarang Kecamatan Jongkong). Secara geografis, Kecamatan Pengkadan berada pada jalur Jalan Lintas Selatan yaitu di antara Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Boyan Tanjung, juga terletak pada persimpangan Jalan menuju Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Selimbau, yang terintegrasi ke dalam naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Kecamatan Pengkadan dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi menjadi beberapa desa yang juga beberapa kali pemekaran yaitu :

1. Pada tahun 1997 terdiri dari 5 Desa :
  1. Desa Permata (Dsn Kerangan Panjang, Dsn Sasan, Dsn Nanga Pedian)
  2. Desa Karya Bhakti (Dsn Mawan, Dsn Nanga Sengkalu, Dsn Lidau)
  3. Desa Batu Datu (Dsn Menendang, Dsn Nanga Semelangit, Dsn Repun, Dsn Sulang)
  4. Desa Karya Suci ( Dsn Buak Limbang, dan Dsn Buak Mau)
  5. Desa Karya Jaya (Dsn Riam Panjang, Dsn Jajang, Dsn Tintin Kemantan, dan Dsn Sukaramai)
2. Pada tahun 2007 terdiri dari 8 desa :
  1. Desa Kerangan Panjang ( Dsn Sasan, dan Dsn Permata)
  2. Desa Mawan (Dsn Mawan, dan Dsn Pengkadan Hilir)
  3. Desa Martadana (Dsn Menendang, Dsn Semelangit, dan Dsn Sulang)
  4. Desa Buak Limbang (Dsn Buak Limbang dan Dsn Buak Mau)
  5. Desa Riam Panjang (Dsn Riam Panjang, dan Dsn Nanga Jajang)
  6. Desa Permata (Dsn Pedian, dan Dsn Cempaka Baru)
  7. Desa Hulu Pengkadan (Dsn Tintin Kemantan, dan Dsn Sukaramai)

8. Desa Pinang Laka (Dsn Repun, dan Dsn Lidau)
3. Pada tahun 2011 terjadi pemekaran Desa menjadi 11 desa definitif sampai sekarang, yaitu :
  1. Desa Kerangan Panjang ( Dsn Cahaya Embau, dan Dsn Cahaya Baru) dipimpin oleh Kepala Desa Abang Musa, membawahi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RT.
  2. Desa Mawan (Dsn Merindu dan Dsn Belibis) dipimpin oleh Kepala Desa Rusliono, membawahi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RT.
  3. Desa Martadana (Dsn Menendang, Dsn Guci Betuah dan Dsn Sulang) dipimpin oleh Kepala Desa M. Yamin membawahi 3 (tiga) Dusun, 6 (enam) RT.
  4. Desa Buak Limbang ( Dsn Mentalang, Dsn Buak Mau, dan Dsn Buak Trans Sejahtera/UPT.13) dipimpin oleh Kepala Desa Kurniawan, membawahi 3 (tiga) Dusun, 7 (tujuh) RT.
  5. Desa Riam Panjang ( Dsn Sungai Kepayang, Dsn Sungai Buluh, dan Dsn Nanga Jajang) dipimpin oleh Kepala Desa Herwansyah, membawahi 3 (tiga) Dusun, 6 (enam) RT.
  6. Desa Permata ( Dsn Nanga Pedian dan Dsn Cempaka Baru dipimpin oleh Kepala Desa Amirrudun membawahi 2 (dua) Dusun, 5 (lima) RT.
  7. Desa Hulu Pengkadan (Dsn Sukaramai dan Dsn Tintin Kemantan) dipimpin oleh Kepala Desa Masran membawahi 2 (dua) Dusun, 5 (lima) RT.
  8. Desa Pinang Laka (Dsn Repun dan Dsn Nanga Lidau) dipimpin oleh Kepala Desa Mahmud, membawahi 2 (dua) Dusun, 6 (enam) RT.
  9. Desa Sasan ( Dsn Sasan Lintas dan Dsn Sasan Embau) dipimpin oleh Kepala Desa Abdul Rani membawahi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RT.
  10. Desa Pengkadan Hilir ( Dsn Sengkalu, dan Dsn Tapang Tua) dipimpin oleh Kepala Desa Sutrapto, membawahi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RT.
  11. Desa Sira Jaya ( Dsn Sira Menuak, Dsn Menendang Tengah, dan Dsn Nanga Semelangit) dipimpin oleh Kepala Desa Surahman Hidayat, membawahi 3 (tiga) Dusun, 6 (enam) RT.

Kecamatan Pengkadan terdiri dari 11 Desa 26 Dusun dan 57 RT, dengan jumlah penduduk Desember 2020  $\pm$  9.599, 3.103 KK dengan luas wilayah  $\pm$  330,34 Km<sup>2</sup> atau sekitar .....% dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan berbatasan :

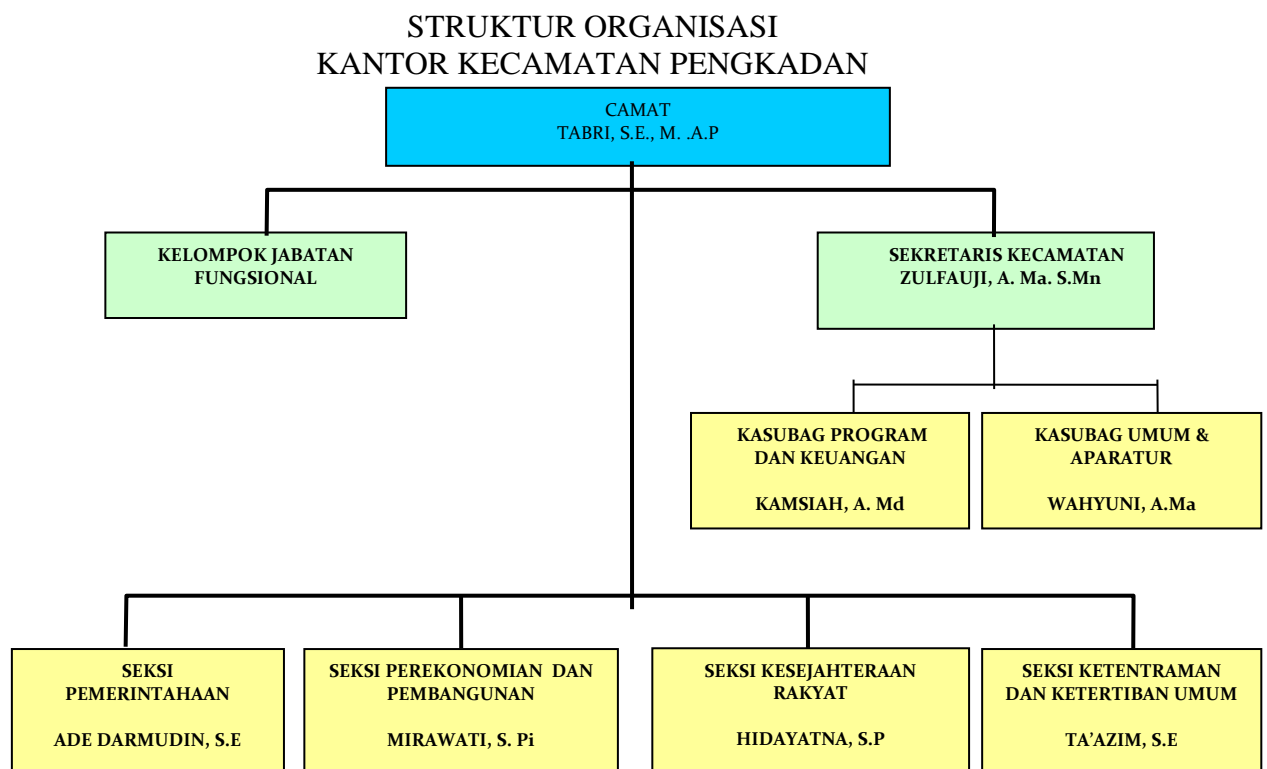


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jongkong
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hulu Gurung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Boyan Tanjung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selimbau

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pengkadan yang dominan di sector pertanian (sawah, ladang, dan karet/getah), perikanan, peternakan, dan perkebunan. Selain itu di sector perekonomian Kecamatan Pengkadan juga didukung oleh budidaya ikan Arwana dan berbagai perdagangan barang sembako (toko dan warung) serta jasa lainnya (bengkel, meubel dan lain-lain).

## 2. Susunan Organisasi

Dalam lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pengkadan sebagai berikut :



### 3. Tupoksi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kasubbag. Program dan Keuangan
- h. Kasubbag. Umum dan Aparatur

#### 1. Camat

Camat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- d. pembinaan wilayah;
- e. pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Camat di dukung oleh:

1. Sekretaris Camat, dalam pelaksanaan tupoksinya yang dibantu oleh:

- a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- b. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
- 2. Seksi Pemerintahan
- 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretaris Camat :

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris sebagaimana mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, Program, Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan, Perpustakaan dan Kearsipan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana Kerja Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalakssana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Skeretariat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1b. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
- d. pemberian administrasi personil Kecamatan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian umum dan Aparatur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas, membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah desa dan atau kelurahan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasa penyeleggaraa Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan pembinaan kemantapan idiologi negara dan kesstabilan sosial politik;
- e. penyelenggaraan kegiatan adaministrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksanaan pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab jepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Keccamatan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan pertimbangan bagi usaha pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. penyiapan bahan koordinasi dalam penerapan dan penegakkan Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundanga-Undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan refresif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. pemberian rekomendasi.ijin atas kegiatan keramaian masyarakat;
- f. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan obyek-obyek vitasl di wilayahnya;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/kelurahan, dan penyusunan rencana pembangunan Kecamatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan perekonomian dan pembangunan sarana prasarana fisik dengan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Seksi berada di bawah Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan dalam wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- b. pembinaan dan pengawasasn terhadap organissasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
- e. penyusuan data kesehatan masyarakat, dan masyarakat miskin;
- f. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan , pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
- g. pamantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Camat melalui pimpinan unit kerja berada dalam lingkup kerjanya.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kantor Camat Pengkadan dalam melaksanakan Tufoksi (Tugas Pokok dan Fungsinya) di dukung oleh 19 orang personil Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	1	9	-	-	-	-	9	-
III	-	6	-	-	-	-	-	-	7	-	-
IV	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-

<b>Jumlah</b>	1	6	2	1	9	-	-	3	7	9	-
<b>Non Eselon</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	1	6	2	1	9	-	-	3	7	9	-

## 5. Sumber Daya Keuangan

Sarana penunjang lain dalam pencapaian tujuan dan sarana Tahun Anggaran 2021 adalah sumber dana, karena adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai di Kantor Camat Pengkadan dalam menjalankan tugas pokoknya. Berikut ini rincian rencana anggaran keuangan Kantor Camat Pengkadan Tahun 2021 yaitu :

### RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN TAHUN 2021

No	JENIS SUMBER DANA	JUMLAH(Rp)	TARGET(Rp)
1	2	3	4
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.386.913.419</b>	<b>2.386.913.419</b>
2	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.976.325.419</b>	<b>1.976.325.419</b>
3	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>410.588.000</b>	<b>410.588.000</b>
	<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00
	Kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00
	Kordinasi dan perubahan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>2. Administrasi Keuangan Peringkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.810.365.419,00	1.810.365.419,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	165.960.000,00	165.960.000,00
	<b>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000,00	18.000.000,00
	<b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.640.000,00	3.640.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2.800.000,00	2.800.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.500.000,00	212.500.000,00
	<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000,00	2.010.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	153.600.000,00	153.600.000,00
	<b>7. Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000,00	400.000,00



<b>II.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.638.000,00	5.638.000,00
<b>Jumlah Total Anggaran</b>		<b>2.386.913.419</b>	<b>2.386.913.419</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana terdiri dari barang tidak bergerak yaitu tanah, gedung/kantor dan barang bergerak terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut :

### Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Kantor Kecamatan Pengkadan

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ruang kantor</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Baik</b>	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Rusak Ringan	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Rusak Ringan	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Rusak Ringan	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Rusak Ringan	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Rusak Ringan	
7	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Rusak Ringan	
8	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Rusak Ringan	
9	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Telkom	1 Ruang	Rusak Ringan	
12	Dapur	1 Ruang	Rusak Ringan	
13	Gudang	1 Ruang	Rusak Ringan	
14	Ruang Tamu	1 Ruang	Rusak Ringan	
15	Ruang Rapat/Aula	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	1 Ruang	Rusak Ringan	
<b>II</b>	<b>Rumah Dinas Camat</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Baik</b>	
<b>III</b>	<b>Rumah Dinas Sekcam</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Renopasi Ruang KTP</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Baik</b>	
<b>V</b>	<b>Ruang Server</b>	<b>1 Ruang</b>	<b>Baik</b>	
<b>VI</b>	<b>Ruang Genset</b>	<b>1 Ruang</b>	<b>Baik</b>	
<b>VII</b>	<b>Instalasi Listrik</b>	<b>2 Ruang</b>	<b>Baik</b>	

Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

Kondisi Sarana Pendukung  
Kantor Kecamatan Pengkadan

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	8	4	3	1 Rusak Berat
2	Komputer	1	1	-	
3	Note Book/ Laptop	16	12	4	
4	TV	1	1	-	
5	Kipas Angin	8	7	1	Rusak Berat
5	AC	1	-	1	Rusak Berat
6	Mesin Tik	2	-	2	Rusak Berat
7	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	
8	Printer	16	10	6	Rusak Berat
9	PC Unit	-	-	-	
10	Genset	1	-	1	Rusak berat
11	Meja Kerja	15	15		
12	Meja Tamu	1	1		
13	Tempat tidur	1	-	1	Rusak Berat
14	Kursi kerja	9	9	-	
15	Kursi rapat	100	95	5	
16	Meja Komputer	-	-	-	
17	Kursi Tamu	3 set	2 set	1 set	
18	Lemari Arsip	1	1		
19	Papan Data	2	2		
20	Helm Pol PP	3	-	3	Rusak berat
21	Dinamo	1	-	1	Rusak berat
22	Pet Pol PP	-	-	-	
23	Alat dapur	13	-	13	Rusak Ringan
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
25	SSB	1 Unit	1	-	
26	Parabola	1 Unit	1	-	
27	Wireless	1	1	-	

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Kinerja merupakan dokumen perencanaan taktis Kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kantor Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Rencana Kinerja berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan tugas pokok, tugas umum dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Kinerja mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Uraian lebih lanjut Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Pengkadan tahun 2018 akan diuraikan dalam bab ini.

#### **A. RENSTRA**

##### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Pengkadan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah

perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Pengkadan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

#### 4.1. VISI DAN MISI SKPD

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Kecamatan Pengkadan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Kecamatan Pengkadan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Kecamatan Pengkadan sebagai suatu unit organisasi di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi. yaitu sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Pengkadan adalah mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang

terdapat dalam sebuah organisasi, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dan kriteria tersebut di atas, maka visi yang ditetapkan Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

***“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,  
RESPONSIF DAN AKUNTABEL”***

Penjelasan dari Visi tersebut mengandung arti:

Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional mengandung arti pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada publik dilakukan oleh aparatur dengan semangat profesionalisme, terencana, dan tepat waktu. Pelayanan Publik yang berkualitas tersebut berawal dari perencanaan yang matang, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, *Tugas Umum Pemerintahan* adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugasnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 4 (Empat) misi Kecamatan Pengkadan yaitu :

***Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima,***

***Misi 2 :Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.***

Dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahankecamatan yang baik melalui pemantapanreformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pengkadan yang prima menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kemampuan aparat yangprofesional menuju tatakelolapemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan tetap menjaga lingkungan hidup sekitar.

#### **4.2.TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Pengkadan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Pengkadan menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel. 4.1

## Tujuan dan sasaran OPD-SKPD Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pengkadan	Indeks kepuasan masyarakat	Score	B	B	B	BB	BB	BB
		Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	81	81	82	82	83	83
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	22	22	22	22	22	22
		Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	bulan	132	132	132	132	132	132



		Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	%	90	90	90	90	90	90
		Ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	%	75	75	75	75	75	75
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	%	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	%	85	85	85	85	85	85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Data	85	85	85	85	85	85
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Dok	6	6	6	6	6	6
		Ketersediaannya Laporan Tepat Waktu ( SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan,	Jumlah Laporan Tepat Waktu ( SIPD, LAKIP,	Laporan	12	12	12	12	12	12

		dan Laporan Aset)	Lapran Keuangan, dan Laporan Aset)							
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	%	90	90	92	92	93	94
3	Optimalnya pengelolaan keuangan Kecamatan	Meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	%	85	86	87	87	88	88
		Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	%	85	85	86	86	86	86
		Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100

			(PKK, DWP, GOPTKI, dll)							
4	Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE Kecamatan	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	5 Jenis	5	5	5	5	5	5
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	%	87	87	90	91	91	91
5	Optimalnya kualitas keterbukaan informasi public	Terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	%	90	90	92	93	94	95

		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	90	90	92	93	94	95
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	85	86	87	88	89	90
6	Meningkatnya maturitas SPIP	Peningkatan tertib administrasi keuangan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	%	90	90	95	95	96	96
		Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	95	95	96	96
7	Meningkatnya sumber daya manusia aparatur sipil Negara yang berkualitas dan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	orang	2	2	3	3	3	3

profesional	Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	Persentase Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	%	80	83	85	90	95	95
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi aparatur Sipil Negara Tepat Waktu	bulan	12	12	12	12	12	12
	Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	91	91	92	93
	Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Unit	1	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	%	100	100	100	100	100	100

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Pengkadan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

#### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pengkadan. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Pengkadan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif.
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanahan
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan “Tulus”.
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Pengkadan adalah :
  - a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai,
  - b. Mewujudkan suasana kerja / lingkungan kerja yang kondusif,
  - c. menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif,
  - d. Mengadakan pembinaan administrasi desa,
  - e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa,
  - f. melaksanakan administrasi pertanahan,
  - g. Menyelenggarakan pelayanan prima,
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Pengkadan adalah :
  - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat,
  - b. Mengadakan bimbingan keagamaan dan sosial kepada masyarakat,
  - c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum.

## B. PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TABRI, S.E., M. A.P.  
 Jabatan : Camat Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN, S.H  
 Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FRANSISKUS DIAAN, S.H

TABRI, S.E., M. A.P.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19641222 198703 1 006





## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PENGKADAN

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TABRI, S.E., M. A.P.  
Jabatan : Camat Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TABRI, S.E., M. A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19641222 198703 1 006

ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn

Pembina

NIP. 19730612 199606 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRAWATI, S.Pi  
 Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan  
 Pada Kantor Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TABRI, S.E., M. A.P  
 Jabatan : Camat Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TABRI, S.E., M. A.P  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19641222 198703 1 006

MIRAWATI, S.Pi  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19821124 201001 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIDAYATNA, S.P  
 Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TABRI, S.E., M. A.P  
 Jabatan : Camat Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TABRI, S.E., M. A.P  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19641222 198703 1 006

HIDAYATNA, S.P  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19781126 200902 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE DARMUDIN, S.E  
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TABRI, S.E., M. A.P  
 Jabatan : Camat Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TABRI, S.E., M. A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19641222 198703 1 006

ADE DARMUDIN, S.E

Penata

NIP. 19750509 199803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TA'AZIM, S.E  
 Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TABRI, S.E., M. A.P  
 Jabatan : Camat Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TABRI, S.E., M. A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19641222 198703 1 006

TA'AZIM, S.E

Penata

NIP. 19690423 201212 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMSIAH, A. Md  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kantor  
 Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn  
 Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn

Pembina

NIP. 19730612 199606 1 002

KAMSIAH, A. Md

Penata Muda Tk. I

NIP. 19810528 201001 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN PENGKADAN**

*Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang 78759*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNI, A.Md  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada Kantor Kecamatan Pengkadan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn  
 Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pengkadan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martadana, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn

Pembina

NIP. 19730612 199606 1 002

WAHYUNI, A.Md

Penata Muda

NIP. 19811228 201001 2 002

**LAMPIRAN :**  
**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	%	75
		2	Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindaklanjuti	%	84
		3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	90
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Pengkadan	4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	70
Tujuan 2: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan					
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Pengkadan	5	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	60
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	80
		7	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	%	80
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	8	Prosentase pengurus PKK yang aktif	%	70
		9	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	%	80
Tujuan 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan					



6	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pengkadan</i>	10	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	%	100
---	--	----	---	---	-----

**Program****Anggaran****Keterangan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Rp. 2.381.275.419,00 APBD
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Rp. 5.638.000,00 APBD

Martadana, 31 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

CAMAT PENGKADAN,

FRANSISKUS DIAAN, SH

**TABRI, S.E., M. A.P**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19641222 198703 1 006**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini terlihat di daftar lampiran.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Terlihat di daftar lampiran.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat di daftar lampiran
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan.

##### Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan Rencana dan Realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Apabila semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- c. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Pengkadan.

Dalam mengukur kinerja Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs (Masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.
2. Outputs (Keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Outcomes (Hasil) adalah suatu yang mencerminkan hasil nyata dari suatu kegiatan.
4. Benefits (Manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
5. Impacts (Dampak) adalah memperlihatkan pengaruh yang timbul dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator Impacts (dampak) dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Strategis pencapaian visi dan misi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kantor Kecamatan Pengkadan berdasarkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, kegiatan yang sesungguhnya selama Tahun Anggaran 2021 (Januari - Desember).

Dari penetapan strategis yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Kantor Kecamatan Pengkadan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator di atas maka ditemukan

bahwa kegiatan tahun 2021 sebagian besar berpusat pada indikator kinerja : Inputs, Outputs dan Outcomes. Tidak tercapainya kedua indikator kinerja disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual dan akurat.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Tingkat Pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

#### **d. Metode Pengimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Hasil pengukuran pencapaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala sebagai berikut :

$85 \leq X < 100$	= Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	= Berhasil
$55 \leq X < 70$	= Cukup Berhasil
$X < 55$	= Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran

tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya}) \times 100\%}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Untuk capai masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori : sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Camat Pengkadan atas tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tugas umum lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki kantor KecamatanPengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas umum lainnya, Kantor Kecamatan Pengkadan didukung oleh : Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur. Kantor Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas umum didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan ini yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dengan jumlah alokasi dana untuk Kantor Kecamatan Pengkadan sebesar Rp. 2.387.913.419,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*). Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Pengkadan dijelaskan melalui 3 hal pokok yaitu :

1. Hasil Pengukuran,
2. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,

### 3. Akuntabilitas keuangan.

**“Meningkatkannya kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Pengkadan”** sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD.

Secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100%	85	85
2	Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin	100%	80	80
3	Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	100%	90	90
4	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan	100%	90	90
5	Indeks kepuasan pegawai terhadap pemberian penghargaan	100%	85	85
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di setiap instansi	100%	90	90

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 6 indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya kreativitas, produksivitas dan profesionalisme aparatur” adalah dengan nilai capaian 87,5 % (Sangat berhasil).Penjelasan indikator-indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan di Kantor Kecamatan Pengkadan mencapai 85,00% yang berarti bahwa pegawai di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan pelayanan ketatausahaan di kantor.  
Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yaitu keterbatasannya sumber daya manusia dan mobilitas dari pegawai yang mengemban tugas ketatausahaan tersebut.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah :

1. Pendidikan keterampilan tentang ketatausahaan,
  2. Penambahan tenaga yang terampil didalam ketatausahaan.
- b. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin di Kecamatan Pengkadan mencapai 80 % yang berarti bahwa pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan penerapan disiplin aparatur di sana.

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yakni kurangnya bacaan atau perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan didiplin tersebut.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Menambah bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan disiplin tersebut,
  2. Lebih meningkatkan kedisiplinan kepada pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Pengkadan.
- c. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai Kantor Kecamatan Pengkadan mecapai 90 % yang berarti pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Pengkadan merasa sangat puas dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yaitu kembali pada alasan poin diatas dengan kurang bahan bacaan atau perundang-undangan yang dapat dijadikan tolak ukur untuk penerapan pelanggaran disiplin tersebut.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Menambah bahan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan disiplin tersebut,
2. Lebih mempertegas sanksi dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin.

- d. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan mencapai 90,00% yang berarti bahwa pegawai di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa sangat puas dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka..

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yaitu tingginya tingkat kebutuhan hidup di perbatasan karena dengan harga barang yang mahal.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam sasaran ini adalah : dengan membangun usaha sampingan misalnya:

1. Usaha Mandiri dengan beternak, berdagang, berjualan ke Negara Malaysia, membuat tahu dan aneka keterampilan lainnya,
  2. Mengajukan dana Pinjaman melalui Bank, Credit Union, maupun koperasi kredit lainnya untuk menambah modal usaha,
  3. Menerapkan pola hidup sederhana kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Pengkadan.
- e. Indeks kepuasan pegawai terhadap pemberian penghargaan di Kantor Kecamatan Pengkadan mencapai 80,00% yang berarti bahwa pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan pemberian penghargaan di kantor.
- Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yaitu keterbatasannya jumlah pegawai yang ada guna meningkatkan kompetisi yang sehat dalam bidang kinerja.
- Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:
1. Pengajuan penambahan pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan terutama untuk Jabatan eselon IV yang masih kosong.
  2. Menerapkan pola penilaian yang lebih kompetitif kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Pengkadan.
- f. Tingkat pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di Kantor Kecamatan Pengkadan mencapai 90,00% yang berarti bahwa pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Pengkadan merasa sangat puas dengan pemberian Tingkat pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di kantor.



Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran ini yaitu keterbatasannya dana dan kurangnya jumlah pelayanan jasa yang ada di Kantor Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah :

1. Pengajuan Dana untuk peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dibidang pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Pengkadan.

**“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum”** sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD.

Secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat kejelasan batas wilayah	100%	100	100

- a. Tingkat kejelasan batas wilayah di Kecamatan Pengkadan mencapai 100 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa sangat puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia tentang tata cara perhitungan luas dan batas-batas desa, bahkan batas Kecamatan di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Mengajukan permintaan sumber data dan kejelasan batas antar desa mau antar kecamatan kepada bidang terkait, pihak desa, bahkan Stakeholders yang berada di Kecamatan Pengkadan,
2. Memberikan pengarahan kepada aparat desa tentang batas-batas yang telah ada.

**Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertibansasaran** tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD.

Secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Terkoordinasinya dan terdatanya korban bencana alam/sosial dan penanganan pengungsi	100%	85	85
2	Tertanganinya kebutuhan tanggap darurat	100%	70	70
3	Tingkat ketaatan penerapan dan penegakan perda	100%	78	78
4	Tingkat penyelesaian gangguan kriminalitas	100%	85	85

- b. Terkoordinasinya dan terdatanya korban bencana alam/sosial dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 85 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa sangat puas dengan sasaran tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan. Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:
1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Instansi Pemerintahan atau Stakeholders terkait,
  2. Pengajuan sarana dan prasarana penunjang guna memenuhi kebutuhan yang belum tersedia kepada Pemerintah Daerah.
- c. Tertanganinya kebutuhan tanggap darurat di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 80 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam mencapai sasaran tersebut, yaitu keterbatasan sumber kebutuhan yang ada di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Pengajuan peningkatan sumber kebutuhan tanggap darurat,
  2. Memaksimalkan sumber-sumber kebutuhan tanggap darurat yang ada di lingkungan Kecamatan Pengkadan.
- d. Tingkat ketaatan penerapan dan penegakkan PERDA di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 78 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa cukup dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber suber bacaan dan peraturan daerah serta minimnya tingkat pengetahuan tentang peraturan daerah yang ada saat ini di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Pengajuan sumber bacaan dan peraturan daerah,
  2. Memberikan pengarahan dan penjelasan kepada masyarakat tentang peraturan daerah di lingkungan Kecamatan Pengkadan.
- e. Tingkat penyelesaian gangguan kriminal di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 85 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa cukup puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu luasnya wilayah dan keterbatasan dari pegawai atau aparatur yang ada untuk mencapai sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur ketentraman yang ada di lingkungan desa,
2. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian khususnya Polsek Kecamatan Pengkadan dalam penyelesaian gangguan kriminal di Kecamatan Pengkadan.

“**Berkembangnya Perekonomian di daerah Kecamatan**” sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD maupun kemandirian masyarakat.

Secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Persentase industri rumah tangga, kecil, dan menengah yang dibina	100%	50	50
2	Bertambahnya jumlah pengusaha disemua segmen pelaku usaha	100%	50	50

- a. Indikator persentase industri rumah tangga, kecil, menengah yang dibina di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 50 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa tidak puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Pengusulan pelatihan, kursus atau yang berkaitan dengan kegiatan sasaran tersebut kepada dinas terkait,
  2. Pengajuan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kegiatan tersebut.
- b. Bertambahnya jumlah pengusaha di semua segmen pelaku usaha di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 50 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa tidak puas dengan sasaran tersebut.
- Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Mempermudah bagi investor untuk membuka usaha di berbagai bidang yang ada di Kecamatan Pengkadan khususnya bidang perkebunan dan perikanan,
2. Pengajuan kepada pemerintah daerah untuk membangun serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut.

**“Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”** sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD.

Secara rinci pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana	Realisasi	Persentase Pencapaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kecamatan benas rawan gizi	100%	80	80
2	Persentase rumah tangga sehat	80%	75	75
3	Persentase Posyandu	90%	82	82
4	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	12	50	50
5	Persentasi organisasi kepemudaan yang aktif	100%	40	40
6	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan	80%	80	80

- a. Kecamatan bebas rawan gisi di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 80 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemberian gizi yang baik. Hal ini dicapai dengan bekerja sama antar pihak terkait.
  2. Pengajuan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana kegiatan tersebut.
- b. Persentase rumah tangga sehat di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 75 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa cukup puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan belum tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Bersama pihak terkait seperti pihak Puskesmas melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemberian gizi yang baik dan pola hidup sehat.
  2. Pengajuan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana kegiatan tersebut.
- c. Persentase Posyandu di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 82 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Melakukan usulan kepada pemerintah daerah untuk dapat membantu dalam keterbatasan sumber daya tersebut,
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada sebelum tersedianya fasilitas yang lebih baik oleh pemerintah.

- d. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 50 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa belum puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat berorganisasi di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Instansi Pemerintahan atau Stakeholders terkait,
  2. Memotivasi masyarakat agar mengerti akan kegiatan organisasi yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan warga.
- e. Persentase organisasi kepemudaan di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 40 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa tidak puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu keterbatasan sumber daya yang ada dan kurangnya kesadaran akan manfaat dari organisasi kepemudaan di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Memberi dorongan kepada masyarakat pedesaan supaya memberi dorongan kepada kaum muda untuk berorganisasi yang baik dan bermanfaat positif bagi masyarakat luas,
  2. Melakukan usulan kepada pemerintah untuk membantu memfasilitasi organisasi kepemudaan dengan kegiatan yang baik.
- f. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kecamatan Pengkadan mencapai 80 % yang berarti bahwa di lingkungan Kecamatan Pengkadan merasa puas dengan sasaran tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Pengkadan dalam melaksanakan sasaran tersebut yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan emansipasi perempuan dalam rumah tangga dalam kegiatan sasaran tersebut di Kecamatan Pengkadan.

Pemecahan masalah atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pengkadan dalam sasaran ini adalah:

1. Melakukan usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan akan kesadaran gender dan tidak kekerasan terhadap perempuan,
2. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait di Kecamatan Pengkadan agar dapat mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

#### A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Tahun 2021) mencapai Rp. 2.203.756.494,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). Rincian/target anggaran dan realisasi anggaran kantor Kecamatan Pengkadan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung Kantor Kecamatan Pengkadan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.386.913.419,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*) dan realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 2.203.756.494,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) atau terealisasi 92,35 %. Belanja Aparatur Daerah ini terdiri hanya terdiri dari Belanja Langsung, penjelasan lebih lanjut mengenai penjabaran rencana anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

##### Belanja Langsung

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
Realisasi	2.203.756.494,00	2.203.756.494,00	92,35

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.203.756.494,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) merupakan pengeluaran belanja rutin Kecamatan Camat Pengkadan Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah dipertanggungjawabkan terdiri dari :



No	Jenis Belanja	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang dan Jasa	410.588.000,00	378.040.000,00	92,07
2	Belanja Pegawai	1.976.325.419,00	1.760.507.194,00	89,08
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	65.209.300,00	100
	<b>TOTAL</b>	<b>2.386.913.419,00</b>	<b>2.203.756.494,00</b>	<b>93,72</b>

#### D. ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.203.756.494,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	1.976.325.419,00	1.760.507.194,00	100	Nihil
2	Belanja Barang dan Jasa	410.588.000,00	378.040.000,00	100	Nihil
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	65.209.300,00	100	Nihil
	<b>Jumlah</b>	<b>2.386.913.419,00</b>	<b>2.203.756.494,00</b>	<b>100</b>	<b>Nihil</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Pengkadan merupakan bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD.

Tahun Anggaran 2021, Kantor Kecamatan Pengkadan melaksanakan 2 (dua) program pembangunan yang meliputi 8 (delapan) kegiatan untuk 5 (lima) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat, maka Kantor Kecamatan Pengkadan mendapat Rp. 2.386.275.419,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*). Anggaran dari APBD Tahun 2021 untuk membiayai program dan kegiatan diatas. Realisasi anggaran kegiatan di Kantor Kecamatan Pengkadan adalah sebesar Rp. 2.203.756.494,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). atau sebesar 92,35 %. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kebijakan Tahun Anggaran 2021 dipaparkan dalam bentuk tabel Rencana Strategis (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2021 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 5 Sasaran yang dilaksanakan tahun 2021 mendapat nilai 87,5 % termasuk kategori *cukup berhasil*.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut atas kerja keras Kecamatan Pengkadan serta dukungan seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan. Pencapaian tersebut dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun

memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Kantor Kecamatan Pengkadan tetap berpedoman kepada visi yang ada *“Terbentuknya Pelayanan Yang Prima Pada Masyarakat dan Menciptakan Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang Sejahtera, Damai, Demokratis, Berkeadilan, Berdaya Saing, Maju Serta Mandiri dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”*.

Pengkadan, 31 Januari 2022

Camat Pengkadan,

**TABRI, S.E., M.A.P**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641222198703 1 006